

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pernyataan yang menggugah kesadaran terutama di masa Indonesia telah memasuki 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda dimana, ketua DPR RI, Agung Laksono mengatakan bahwa, "*Nation and Character Building harus kita terus bentuk di atas realitas multikultural menjadi bangsa besar dengan rakyat yang sejahtera. Kegagalan mengidentifikasi masalah-masalah bangsa pasti akan membuat bangsa ini sulit berkembang. Bangkitnya primordialisme dan etnosentrisme justru akan menimbulkan beban bagi tumbuhnya bangsa ini. Mari kita perkuat jati diri bangsa mengatasi problem-problem bangsa.*"¹ Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bangsa Indonesia mengalami kemandegan di dalam perkembangan. Menurut beliau kemandegan tersebut oleh karena bangkitnya primordialisme dan etnosentrisme. Pernyataan Ketua DPR RI tersebut ada benarnya, namun hanya melihat dari suatu segi tertentu saja dari perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia yang multikultural.

Kegagalan disebabkan bukan oleh rasa keterikatan terhadap suku atau dikenal dengan primordialisme dan keterikatan secara historis atau alamiah kepada suku bangsa yang dikenal dengan etnosentrisme. Karena sesungguhnya primordialisme dan etnosentrisme merupakan realitas dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Justru dari kesadaran terhadap primordialisme dan etnosentrisme merupakan tempat berpijak bagi pengembangan masyarakat Indonesia. Kegagalan pembangunan dewasa ini bukan disebabkan oleh adanya kenyataan sosial budaya yang bhineka dari masyarakat Indonesia namun mungkin disebabkan karena perkembangan masyarakat yang salah arah dan salah pemimpin. Penelitian ini akan mencoba mengungkapkan pandangan-pandangan dari calon pemimpin Indonesia ke depan terhadap nasionalisme yang didalamnya mencakup etnisitas dan identitas bangsa Indonesia, yang merupakan dasar pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia.

¹ Harian Suara Pembaruan, 16 Agustus 2006, Sambutan Ketua DPR RI menyambut Hari Proklamasi ke-61

UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan dengan tegas tentang realitas multikultur bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut dilukiskan di lambang Negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia diakui bahkan dijadikan sebagai dasar perjuangan nasional permulaan abad-20. Tidak kurang dari Manifesto Politik tahun 1925 yang dirumuskan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Eropa pada waktu itu yang mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai oleh persatuan dari suku-suku bangsa Indonesia yang beragam.² Manifesto politik tersebut mendahului sumpah pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mengikrarkan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa dan bertekad sebagai satu bangsa yang besar yang mempunyai satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia. Inilah cita-cita yang telah mengikat berbagai suku bangsa tersebut untuk melepaskan diri dari ikatan kolonialisme Belanda. Inilah makna nasionalisme menurut pemuda di awal Abad 20.

Perjalanan perkembangan bangsa sejak Proklamasi 1945 mengalami pasang surut dan yang terakhir menapaki era reformasi yang pada hakikatnya ingin membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih demokratis. Sejalan dengan cita-cita tersebut antara lain telah lahir UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Lahirlah konsep desentralisasi di dalam membina masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tidak sebagaimana masa orde lama dan orde baru, diskursus nasionalisme sekarang memang tidak lagi didominasi oleh negara. Dulu nasionalisme selalu diketengahkan secara monolitik oleh negara, baik sebagai slogan revolusi di zaman Soekarno atau sebagai pelegitimasi stabilitas di masa Soeharto. Warganegara yang menyangkal dominasi negara dalam menetapkan diskursus nasionalisme akan menghadapi tuduhan sebagai anti-nasionalis bahkan subversif. Di masa Soekarno, slogan nasionalisme diteriakkan untuk mengukuhkan kedaulatan dan menolak intervensi asing. Korban-korban nasionalisme adalah para ‘pembangkang’ dalam gerakan PKI Madiun 1948, DI/TII di Jawa dan Aceh, PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, dan lain sebagainya. Di era Soeharto term ‘nasionalisme’ bersama isme-isme ideal lain disarikan dalam nama agung

² Tilaar, H.A.R., *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Hal. xxii

'Pancasila.' Yang tidak pancasilais bermakna separatis, tidak nasionalis. Setelah selama puluhan tahun menjadi wacana tunggal yang kaku dan dikendalikan oleh negara, seiring runtuhnya rezim otoritarian, nasionalisme membentuk formasi diskursif yang lebih beragam. Aktornya tidak lagi negara, tapi masyarakat sipil.

Sejalan dengan proses demokratisasi di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, lahirlah kembali (*rebirth*) pengakuan terhadap kebinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebhinnekaan sebagai kenyataan sosial budaya masyarakat Indonesia merupakan modal pertama untuk melangkah ke masyarakat yang lebih demokratis. Bahwa di dalam proses demokratisasi selama ini timbul gejala-gejala negative seperti ekses-ekses yang mementingkan kelompok dan suku sendiri (sukuisme), kecenderungan untuk menggunakan nilai-nilai kelompok dan memaksakannya untuk semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Terjadinya gesekan-gesekan sosial baik secara horizontal maupun secara vertical memang sepiantas selalu disebabkan karena timbulnya mementingkan diri sendiri secara berlebih-lebihan dan merupakan pengingkaran kesepakatan di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu pengakuan terhadap kebinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Melihat perbedaan antara konsep etnisitas dan nasionalitas berarti melihat transisi dari kondisi praktis dari otonomi kebudayaan ke arah kesadaran diri yang terorganisasi di dalam tuntutan-tuntutan politik. Dengan kata lain, indentitas yang terfragmentasi dan bekal dari indentitas etnis menuju kepada kesatuan nasional yang lebih terarah dan terintegrasi. Untuk mengetahui perubahan tersebut sangat diperlukan pendekatan sejarah. Kita lihat misalnya di dalam sejarah pertumbuhan nasionalisme di Indonesia dari suku-suku yang berjenis-jenis kemudian disatukan di dalam suatu gerakan nasional untuk membebaskan diri dari penindasan penjajahan Belanda. Apabila pada permulaanya terjadi pemberontakan-pemberontakan secara lokal dari suku-suku bangsa di Nusantara, kemudian terjadi kesatuan perjuangan melawan penjajahan yang mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.

Di dalam transisi ke arah kesadaran nasional tersebut peranan kebudayaan memang perlu diperhatikan. Di dalam kaitan ini, perlu disimak kontribusi studi dari Center for Contemporer Cultural Studies (CCCS) di Universitas Birmingham.

Raymond Williams di dalam bukunya *Culture and Society* (1958) menyarankan untuk membawa kembali budaya di dalam studi masyarakat. Menurut Raymond William pengertian kebudayaan (*culture*) mempunyai banyak arti: 1) kebudayaan sebagai proses intelektual, spiritual, dan estetik dari seseorang individu; 2) kebudayaan sebagai gaya hidup (*way of life*); 3) Kebudayaan sebagai hasil karya dan praktik intelektual khususnya dalam bidang artistik; dan 4) Kebudayaan sebagai suatu sistem yang signifikan melalui sistem tersebut dikomunikasikan keteraturan sosial (*social order*), bahkan direproduksi dan dihayati serta dikembangkan oleh individu serta masyarakat.

Rumusan Raymond William mengenai kebudayaan tersebut di atas sangat penting di dalam mengikuti perkembangan nasionalisme dan identitas suatu bangsa. Identitas nasional atau identitas bangsa merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang di dalam komunitasnya. Nasionalisme akan tampak di dalam kenyataan apabila rakyat biasa sebagai penyandang identitas membayangkan dirinya sendiri sebagai anggota dari komunitas yang abstrak. Inilah yang dimaksudkan oleh Benedict Anderson dalam tulisannya di *Imagined Community* (1993) yaitu merasa suatu bagian dari komunitas yang digambarkan berupa keanggotaan seseorang terhadap komunitas bangsanya. Bangsa yang menggambarkan adanya suatu *imagined communities* menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa di dalam satu kesatuan. Inilah yang akan menimbulkan loyalitas nasional.³

Suatu tulisan menarik dari Harsya W. Bahtiar berjudul *Integrasi Nasional Indonesia*, diterbitkan oleh Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB Pusat) pada tahun 1994. Dalam tulisannya itu, Prof. Bahtiar menguraikan secara gamblang mengenai apakah sebenarnya nasionalisme Indonesia dan bangsa Indonesia. Perlu kiranya dibedakan antara *nation* Indonesia (bangsa Indonesia) dan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah suatu organisasi politik. Keanggotaan dalam organisasi negara disebut warga negara yang diatur undang-undang. Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas kebangsaan. Seorang warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia

³ Anderson, Benedict, *Imagined Communities (terjemahan)*, Yogyakarta: Insist 2002

belum tentu dia adalah bangsa Indonesia. Seorang merupakan bangsa Indonesia kalau dia itu menganggap bagian dari *nation* Indonesia yaitu suatu kesatuan solidaritas dari seseorang terhadap tujuan bersama masyarakat Indonesia. Kesatuan solidaritas berasal dari *nation-nation* yang sudah lama ada di kepulauan Nusantara seperti bangsa Jawa, Minang, Minahasa, Papua. Demikian pula suku-suku bangsa lainnya di Nusantara termasuk suku keturunan Cina, Arab, dan penduduk lainnya yang telah menganggap kepulauan Nusantara ini sebagai tanah airnya.

Tumbuhnya *nation* Indonesia ini kita lihat bermula dari kebangkitan nasional dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. pada mulanya gerakan Budi Utomo terbatas sebagai gerakan sekelompok mahasiswa kedokteran yang berasal dari Jawa. Kemudian gerakan Budi Utomo tersebut merangkum kepentingan nasional yang lebih luas.

International Encyclopedia of Social Science memberikan definisi nasionalisme kebangsaan sebagai suatu ikatan politik yang mampu mengikat satu kesatuan dari seluruh elemen masyarakat yang plural, modern sekaligus memberikan determinasi legitimasi terhadap tuntutan kekuasaan. Namun definisi ini masih terlalu longgar untuk diperdebatkan, definisi ini menyederhanakan nasionalisme sebagai sebuah alat politik negara untuk mengontrol individu yang menjadi warga negara. Nasionalisme tidak sesempit itu, dia lahir sebagai sebuah produk sejarah, sehingga sebuah komunitas bangsa memiliki sebuah cita-cita bersama.

Untuk itu Siswono Yudohusodo memberikan sebuah penekanan definisi seputar nasionalisme, dengan terlebih dahulu menguraikan pengertian mendasar tentang rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan, dan wawasan kebangsaan.⁴ Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu kesadaran untuk bersatu sebagai bangsa yang lahir secara alamiah karena sejarah, karena aspirasi perjuangan masa lampau, karena kebersamaan kepentingan, karena rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita bangsa untuk waktu yang akan datang.

⁴ Yudhohusodo, Siswono, *Semangat Baru Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pembangunan Indonesia 1996. Hal 12-13

Cita-cita inilah yang menyerupai nasionalisme. Cita-cita ini lahir dari rahim rasa. apa yang dirasakan masyarakat nusantara (sebelum menjadi Indonesia) adalah tekanan imperialisme yang begitu kuat, penjajahan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan secara umum, eksploitasi, penjarahan dan pemaksaan kehendak. Deipersatukan oleh rasa yang sama, penderitaan yang sama, kebutuhan yang sama, kerinduan akan kebebasan yang sama, dan dari banyak lagi kesamaan-kesamaan lainnya, maka masyarakat nusantara bangkit melawan imperialisme dan menandatangani kontrak bersama untuk menjadi sebuah Indonesia, sebuah negara dari ribuan bangsa, namun disatukan oleh rasa dan cita-cita yang sama.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melakukan proses diskursif nasionalisme di tengah masyarakat pasca orde baru. Dimana pasca orde baru Negara tidak lagi mendominasi diskursus nasionalisme. Melainkan diskursus nasionalisme menjadi milik publik dalam penerjemahannya. Untuk itu penelitian ini menjadi penting, karena penelitian ini mencoba mengungkap diskursus nasionalisme yang berkembang di tataran OKP di era reformasi.

Seiring dengan bergantinya rezim politik dan berubahnya konstelasi hubungan antar-bangsa, diskursus nasionalisme pun berubah. Ia bersifat lebih terbuka. Negara semakin tidak dominan. Ini karena dua hal, *pertama*, kekuasaan internalnya kini semakin terdesentralisasi. Meskipun berkarakter oligarkis, kekuasaan negara terdesentralisasi kepada sejumlah institusi sehingga tidak lagi memiliki pusat kekuasaan tunggal. Akibatnya, negara direpresentasikan dalam bentuk yang beragam. *Kedua*, karena negara tidak lagi mampu mendikte arus komunikasi antar-bangsa yang terjadi dalam wilayahnya sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi membuat arus hubungan antar-individu warga bangsa semakin cepat dan tak terkendali. Dampak dari semua ini adalah naiknya subyek tandingnya ke permukaan, yaitu masyarakat sipil.

Demi memperjuangkan kepentingannya, masyarakat sipil yang mandiri dari negara mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok kepentingan yang beragam. Dengan kemandiriannya, OKP ini bebas menjalin relasi dan membangun jaringan dengan apapun yang menjamin tercapainya kepentingan mereka. Dengan keragaman kepentingannya, OKP juga bersifat sangat plural dalam karakter,

strategis, dan perspektif. Sejumlah ilmuwan mengatakan bahwa abad XXI adalah era berakhirnya nasionalisme dan kejayaan negara-bangsa⁵. Globalisasi telah menghadirkan suatu tatanan geopolitik yang bersifat transnasional. Negara-bangsa menjadi lemah karena imajinasi warga masyarakat terlalu luas untuk dibatasi kepada sepetak ruang identitas bernama bangsa. Kita dapat melihat OKP bekerja dalam lanskap jejaring, sifatnya bisa lokal, regional, hingga transnasional. Mereka sejatinya tidak digerakkan oleh negara-bangsa, bahkan justru berpotensi mengontrol dinamika yang terjadi dalam sebuah atau sejumlah negara-bangsa.

Diskursus nasionalisme akan membuat hubungan mereka dengan negara-bangsa dilematis. Mereka dihadapkan pada pilihan antara harus menempatkan Negara bangsa dari mana ruang politik awal mereka berasal sebagai muara perjumpaan segala kepentingan di satu sisi, atau pilihan untuk memulai kembali perdebatan diskursif tentang nasionalisme dan negara-bangsa di sisi lain. Dalam kaitan ini, pilihan pertama bersifat utopis karena hanya akan mengembalikan dominasi negara-bangsa. Hal ini membuat pilihan kedua menjadi lebih realistis. Kasus-kasus yang diketengahkan di atas adalah salah satu wujud eksperimentasi masyarakat sipil terhadap diskursus nasionalisme. Suara mereka tentang nasionalisme memang masih terdengar. Keragaman itu bisa karena kepusparagaman kepentingan, lingkup jejaring, karakter kultural, atau persepsi konseptual tentang nasionalisme itu sendiri. Penelitian ini bermaksud mengungkap hal tersebut.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Mencermati realitas dan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan diskursus nasionalisme Indonesia dari masa sebelum reformasi dan sesudah reformasi?
2. Bagaimana Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda mendefinisikan identitas kebangsaan dan nasionalisme keindonesiaan?

⁵ Appadurai, Arjun. *Disjuncture & Difference in the Global Culture Economy*. dalam Jonathan Xavier Inda and Renato Rosaldo [Eds.]. *The Anthropology of Globalization: A Reader*. Malden: Massachussets. 2002.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan diskursus nasionalisme Indonesia dari sebelum reformasi dengan sesudah reformasi.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui definisi nasionalisme menurut Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan pemerintah Republik Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Akademis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang nasionalisme dan kepemudaan di Indonesia.

2. Praktis

Studi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan Negara dalam mendefinisikan nasionalisme dan identitas nasional di kalangan pemuda.

Studi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan OKP dalam mendefinisikan nasionalisme dan identitas nasional dalam menjaga keutuhan negara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam enam bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Sementara itu bab dua memaparkan tinjauan literatur yang terdiri dari perspektif teoritik dan penelitian terdahulu. Bab tiga tesis ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada Bab empat peneliti menjabarkan profil dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang diteliti. Bab lima peneliti mencoba menjelaskan kerangka kesejarahan (*historical framework*) yang menggambarkan transisi dari apa yang disebut nasionalisme di rezim otoriter menuju apa yang disebut nasionalisme pasca reformasi. Dengan menggunakan data-data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dari pihak pemerintah dan literatur-literatur yang diterbitkan pemerintah. Selain itu, di bab ini peneliti juga menganalisis diskursus nasionalisme dari OKP berdasarkan gagasan OKP terhadap

Indonesia, Nasionalisme, identitas nasional, dan negara-bangsa. Penelitian ini akan ditutup pada bab enam dengan kesimpulan dan rekomendasi.

